

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat adalah merupakan provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sumatra dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatra Barat terbentang sepanjang pesisir barat sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya. Provinsi Sumatra Barat saat zaman VOC bernama *Hoofdcomptoir van Sumatra's westkust*. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumatera Barat bagian dari provinsi Sumatra yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatra dibagi menjadi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sumatera Barat, Riau dan Jambi merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Tengah (Azhari, 2020).

Selanjutnya pada masa PRRI, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatra Tengah terpecah menjadi tiga provinsi, yakni Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Ibu kota dari Provinsi Sumatra Barat yang baru tetap berada di Bukittinggi. Kemudian Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi pindah ke Kota Padang.

Setelah pemberlakuan otonomi daerah dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Sumatra Barat mempunyai 12 kabupaten dan 7 kota, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten/kota yang terluas (14,31%), dan Padang panjang menjadi kabupaten/kota yang terkecil luasnya (0,05%). Provinsi Sumatra Barat terdiri dari Kabupaten Agam, Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.

penelitian fokus pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat. Kinerja merupakan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan (Isna dan Ayu, 2015). Dasar yang digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemda Sumatra Barat ini adalah dengan menggunakan analisis rasio.

Setiap daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menggali sumber pendapatannya dengan melakukan segala upaya demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah APBD dijabarkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda).

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang dapat dipakai untuk menghasilkan pendapatan (*income*). Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diubah menjadi UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dimana sumbernya berasal dari ekonomi asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Pendapatan daerah juga memegang peranan penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara umum, PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra (2014), memberikan kesimpulan terhadap kemandirian dan efektifitas keuangan PAD tiap kota/kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Pada rasio kemandirian, nilai-rata-rata tahun 2004-2011 kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 6,5% yang menandakan pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0-25%. Hal ini menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar (pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. Sedangkan pada efektivitas, secara rata-rata dari tahun 2004-2011 berada pada kecendrungan sebesar 109,8% yang menandakan berada pada kategori sangat efektif.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih membahas kinerja keuangan pemerintah daerah (Saputra, 2014; Novela, 2021; Faisal, 2018). Belum banyak

yang melakukan perhitungan perbandingan kinerja antar kabupaten/kota dan menambahkan rasio belanja pegawai dan juga dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti ingin mengetahui perbandingan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat dan mengetahui seberapa besar dampak dari pandemi Covid-19 ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan pemerintah pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2018-2021?
2. Bagaimana gambaran perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk;

1. Mengetahui gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat
2. Mengetahui gambaran perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Menambah referensi serta menambah pemahaman tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2018-2021
2. Bagi instansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini sebagai informasi, dapat digunakan untuk perbandingan dan sebagai acuan untuk upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah antar kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, perumusan masalah dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dapat memberikan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembaca sehingga memahami masalah yang disajikan dalam penelitian ini. Maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari definisi Provinsi Sumatra Barat, pendapatan asli daerah, sumber pendapatan daerah, pengukuran kinerja, pentingnya penilaian

kinerja, cara pengukuran kinerja dan rasio kinerja keuangan daerah serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data, pengolahan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis pengelolaan data dan gambaran data, secara analisis data, dan pembahasan yang merupakan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan untuk masing-masing variable, dimana hasil dari pengolahan tersebut adalah jawaban dari rumusan dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

